

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004: 11). Tujuan utama pembangunan ekonomi ini, selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Pemerintah banyak melakukan upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta pemerataan distribusi pendapatan namun hasilnya jauh dari memuaskan. Kelemahan kebijakan pemerintah terletak pada kemampuan untuk menjalankan kebijakan secara terus-menerus (*sustainability*) yang rendah, sehingga selesai program semua aktivitas juga akan selesai (Widarjono, 1999: 147). Dalam kurun waktu tertentu Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan di bidang ekonomi. Tak bisa dipungkiri bahwa sejak lahirnya orde baru, kondisi perekonomian nasional mengalami perbaikan yang cukup berarti (Sriyana, 1999: 102). Hal ini dapat dilihat dari angka-angka indikator makro ekonomi yang utama. Pertumbuhan ekonomi yang pernah mencapai 8% lebih pada tahun 1995 merupakan prestasi ekonomi yang luar biasa. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1993-2005
(Atas Dasar Harga Konstan 1993)

Tahun	Pertumbuhan (%)
1993	6,72
1994	7,48
1995	8,27
1996	7,72
1997	4,96
1998	-13,37
1999	0,93
2000	4,77
2001	3,44
2002	3,66
2003	4,10
2004	5,13
2005	5,60

(Sumber: BPS, *Indikator Ekonomi*, 1993-2005).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Kondisi ini, menghadapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik lokal (daerah) secara tepat. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi daerah akan membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang akan diterapkan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah pola kebijakan yang pernah

diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya (Arsyad, 1999:128).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistematis. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Setiap daerah tidak mengalami pertumbuhan yang sama, ini disebabkan karena potensi daerah dan fasilitas prasarana yang dimiliki setiap daerah berbeda. Banyak investor lebih memilih menanamkan modalnya pada suatu daerah yang telah terpenuhi fasilitasnya, karena dengan berbagai pertimbangan, termasuk dalam menunjang kemudahan usahanya, untuk itu bagi daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas-fasilitas tersebut dimungkinkan akan relatif lebih tertinggal. Alhasil, akan menyebabkan kesenjangan antar daerah yang semakin besar, yang akan berdampak pula terhadap tingkat pendapatan antar daerah tersebut (P4N, 1997: 1-2).

Sumatera yang terletak di Indonesia, merupakan pulau keenam terbesar di dunia, dengan luas 443.065,8 km². Penduduk pulau ini sekitar 42.409.510 jiwa pada tahun 2000. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudera Hindia. Secara umum, pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu, yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku-suku terbesar ialah Aceh, Gayo, Batak, Melayu, Minangkabau, Lampung, Palembang dan Rejang (www.wikipedia.com).

Sebelum tahun 2002 Sumatera hanya terdiri dari 9 propinsi, tetapi pada tanggal 24 September 2002 berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau maka Propinsi Kepulauan Riau secara sah ditetapkan sebagai propinsi yang termuda di Sumatera. Jumlah propinsi di Pulau Sumatera berjumlah 10, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Di antara pulau yang ada di Indonesia, Sumatera memiliki jumlah propinsi terbanyak dan jumlah kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Banyaknya SDA yang tersedia seharusnya dapat memacu tingkat pertumbuhan dan perekonomian Sumatera. Perkembangan PDRB antar pulau dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2003-2006 (juta rupiah)

Pulau	2003	2004	2005	2006
Sumatera	346.714.587,65	356.878.954,36	369.611.195,10	389.297.239,30
Jawa	908.518.250,11	957.573.912,84	1.012.694.508,35	1.071.010.356,22
Bali	19.080.895,84	19.963.243,81	21.072.444,79	22.184.679,28
Kalimantan	144.494.589,41	148.843.726,77	154.683.596,07	160.483.418,06
Sulawesi	65.986.959,76	69.738.303,66	74.093.917,12	79.243.769,77
Lainnya*	53.739.884,90	50.857.326,61	57.976.829,56	55.530.348,14

Sumber: BPS, 2006

Catatan: *) : Merupakan gabungan dari Propinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat, bahwa jumlah PDRB Sumatera merupakan terbesar kedua setelah Jawa. Perkembangan PDRB tersebut juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2006 PDRB Sumatera telah mencapai Rp. 389.29 triliun.

Laju tingkat perkembangan wilayah, kesejahteraan dan kemakmuran di Pulau Sumatera relatif lebih maju jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Perkembangan perekonomian tersebut dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2004-2006 pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Propinsi (Jutaan Rupiah)

Propinsi	2004	2005	2006
N.Aceh Darusalam	40.374.282,30	36.287.915,29	37.158.868,55
Sumatera Utara	83.328.948,58	87.897.791,21	93.330.108,26
Sumatera Barat	27.578.136,56	29.159.480,53	30.949.945,10
Riau	75.216.719,28	79.287.586,75	83.370.867,24
Jambi	11.953.885,47	12.619.972,18	13.363.620,73
Sumatera Selatan	47.344.395,00	49.633.536,00	52.125.287,00
Bengkulu	5.896.255,33	6.239.364,35	6.610.625,72
Lampung	28.262.288,53	29.397.248,40	30.847.023,03
Kep Bangka Belitung	8.414.980,21	8.706.800,18	9.009.890,59
Kep Riau	28.509.063	30.381.500,21	32.411.003,07

Sumber: BPS, 2006

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penyumbang PDRB terbesar di Pulau Sumatera adalah propinsi Sumatera Utara, dari tahun ke tahun jumlah PDRB propinsi tersebut mengalami kenaikan, sedangkan penyumbang kontribusi PDRB terkecil di Sumatera adalah propinsi Bengkulu.

Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Berdasarkan latar belakang di atas maka dimungkinkan terjadi ketidakmerataan pertumbuhan PDRB dan pelaksanaan pembangunan di tiap propinsi. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing propinsi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi propinsi yang ada di Pulau Sumatera?
2. Bagaimana ketimpangan antarpropinsi yang terjadi di Pulau Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengklasifikasikan propinsi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang ada di Pulau Sumatera.
2. Untuk menganalisis ketimpangan antar propinsi yang ada di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijaksanaan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada tiap propinsi sesuai kondisi alam yang dapat dikembangkan.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk kasus-kasus serupa.

1.5 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitiannya, Sutarno dan Kuncoro mengambil judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan: Kasus Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan alat analisis indeks ketimpangan regional yaitu tipologi daerah, indeks Williamson, indeks entropy Theil, hipotesis Kuznets dan korelasi Pearson.

Dalam penelitiannya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam periode pengamatan 1993-2000, terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropy Theil. Dari hasil analisis menggunakan indeks Williamson menunjukkan bahwa, rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Banyumas yang sebesar 0,426 lebih

rendah bila dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,691. Ketimpangan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 cenderung meningkat. Pada tahun 1993 nilai ketimpangan indeks Williamson mencapai 0,35 dan mengalami peningkatan sebesar 0,47 pada tahun 2000.

Berdasarkan indeks ketimpangan entropy Theil pada periode tahun 1993-2000, rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar 0,0396. Seperti indeks Williamson, indeks entropy Theil juga menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 1993, nilai indeks entropy Theil sebesar 0,032 dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 0,046. Di mana yang menyebabkan ketimpangan ini salah satunya adalah disebabkan oleh aktivitas ekonomi secara spasial.

Berdasarkan tipologi daerah menurut pertumbuhan dan pendapatan per kapita, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok:

1. Daerah/kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) : Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Ajibarang, Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur.
2. Daerah/kecamatan maju tapi tertekan (*high income but low growth*) : Kecamatan Wangon, Somagede, dan Baturaden.

3. Daerah/kecamatan yang berkembang cepat (*high growth but low income*) :

Kecamatan Kebasen, Purwojati, Cilongok, Karanglewas, dan Purwokerto Utara.

4. Daerah/kecamatan yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) :

Kecamatan Lumir, Jatilawang, Rawalo, Kemranjen, Sumpih, Tambak, Patikraja, Gumelar, Pekuncen, Kedungbanten, dan Sumbang.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin (2003) yang berjudul “Ketimpangan Spasial dan Perubahan Struktural Industri Manufaktur Berorientasi Ekspor (Indonesia, 1990-1999)”, menerapkan analisis konsentrasi dan dispersi dilakukan dengan menggunakan indeks entropi Theil. Penelitian ini menitikberatkan pada daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai wilayah terkecil dari daerah yang bersifat otonom. Analisis konsentrasi dan dispersi yang dilakukan dengan menggunakan indeks entropi Theil didasarkan pada ketimpangan antarpulau utama, antarpropinsi, dan kabupaten/kota dalam propinsi.

Menurut Pawanto (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa Periode Tahun 1998-2001” Dengan menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk per kabupaten se-Jawa selama periode tahun 1998-2001, sebagai hasilnya menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar propinsi menyumbang rata-rata lebih dari 99% selama periode pengamatan dibanding kesenjangan pendapatan dalam propinsi. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa kesenjangan pendapatan antar propinsi di Jawa sangatlah timpang, dan kesenjangan antar kabupaten/kota dalam propinsi memiliki kesenjangan

yang lebih kecil. Selain indeks kesenjangan entropy Theil dalam penelitian ini juga digunakan hipotesis Kuznets dan korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan PDRB dan tingkat kesenjangan regional di Jawa. Dengan menggunakan data per propinsi selama periode pengamatan, didapatkan hasil korelasi Pearson tidak signifikan yang berarti juga bahwa tidak terdapat korelasi antara pertumbuhan PDRB dan tingkat kesenjangan regional, sedangkan berdasarkan hipotesis Kuznets yang menggambarkan hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan regional dengan pertumbuhan PDRB yang berbentuk U terbalik juga tidak berlaku di Jawa.

Wijaya (2006) melakukan penelitian, dengan judul "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antarkecamatan (Kasus Kabupaten Sleman Tahun 1999-2003). Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa data tahunan dari tahun 1998-2003. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, DIY. Alat analisis yang digunakan ialah tipologi daerah, indeks ketimpangan Williamson, dan indeks ketimpangan entropi Theil. Analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan yang berkembang cepat dan kecamatan tertinggal. Berdasarkan indeks ketimpangan Williamson, Kabupaten Sleman pada tahun 1998 sampai dengan 2003 terjadi kecenderungan ketimpangan yang tidak stabil. Dengan analisis indeks entropi Theil terjadi kecenderungan penerunan ketimpangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2003-2006.

1.6.2 Definisi Operasional

Untuk melakukan studi empiris dalam penelitian tentang “Disparitas antar Propinsi di Pulau Sumatera: Studi Kasus Tahun 2003-2006” , maka data yang diteliti harus jelas definisinya sehingga dapat menghasilkan analisis dan kesimpulan yang tepat.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi (G_t) ialah tingkat pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan. G dapat dihitung dengan rumus: (Boediono, 1985)

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto riil pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto riil pada satu tahun sebelum tahun t

- b. Pendapatan per kapita (Y kapita) dihitung dengan rumus:

$$Y_t \text{ kapita} = PDRB_t \text{ riil} / \text{jumlah penduduk pada tahun } t$$

1.6.3 Metode Analisis

1.6.3.1 Metode Analisis Tipologi Daerah

Metode analisis tipologi daerah atau *Tipologi Klassen* digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah dalam hal ini kecamatan yang diamati, dapat dibagi menjadi empat klasifikasi/golongan, yaitu: daerah/kecamatan yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah/kecamatan maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah/kecamatan yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah/kecamatan yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Sjafrizal, 1997: 27-38; Kuncoro & Aswandi, 2002: 27-43).

Kriteria yang digunakan untuk membagi propinsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) propinsi yang relatif cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu propinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata propinsi lain di Sumatera, (2) propinsi relatif maju tapi tertekan, yaitu propinsi yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata propinsi lain di Sumatera, (3) propinsi yang relatif berkembang cepat, yaitu propinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata propinsi lain di Sumatera, (4) propinsi yang relatif tertinggal,



yaitu propinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata propinsi lainnya di Pulau Sumatera.

1.6.3.2 Indeks Ketimpangan Williamson

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lain dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Ketimpangan pembangunan antarpropinsi yang terjadi di pulau Sumatera dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997: 31):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots (1.1)$$

Di mana:

- IW = indeks ketimpangan Williamson
- Y_i = PDRB per kapita di propinsi i
- Y = PDRB per kapita rata-rata di Pulau Sumatera
- f_i = jumlah penduduk di propinsi i
- n = jumlah penduduk di Pulau Sumatera

Dari hasil perhitungan indeks ketimpangan Williamson akan diperoleh besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antarpropinsi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pembangunan di Sumatera. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Sumatera akan dibahas pemerataan PDRB per kapita antarpropinsi yang dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson dan indeks entropi Theil. Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang makin kecil atau makin merata, dan apabila angka indeks Williamson semakin jauh dari nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin melebar antarpropinsi yang satu dengan lainnya.

1.6.3.3 Indeks Entropi Theil

Konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, serta distribusi produk domestik bruto dunia (Kuncoro, 2002: 41-45).

Indeks entropi Theil dapat dibagi menjadi dua sub indikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah. Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di pulau Sumatera. Rumus dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut: (Ying, 2000: 59-70).

$$I(y) = \sum (y_j / Y) x \log[(y_j / Y) / (x_j / X)] \dots\dots\dots (1.2)$$

Di mana:

$I(y)$ = indeks entropi Theil

y_j = PDRB per kapita propinsi j

Y = rata-rata PDRB per kapita Pulau Sumatera

x_j = jumlah penduduk propinsi j

X = jumlah penduduk Pulau Sumatera

Indeks entropi Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks entropi Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial. Misalnya ketimpangan antardaerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2002: 44).

Indeks entropi Theil yang semakin membesar menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin kecil, maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain semakin merata. Indeks ketimpangan entropi Theil tidak memiliki batas atas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar nilainya maka semakin timpang dan semakin kecil semakin merata.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terkait, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu tentang teori pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di tingkat daerah.

BAB III PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PROPINSI-PROPINSI DI PULAU SUMATERA

Bab ini menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian propinsi-propinsi di Pulau Sumatera secara umum dan hal-hal yang berkaitan didalamnya.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang analisis data dan pembahasan hasil pengolahan data dengan menggunakan alat analisis Tipologi Daerah, Indeks ketimpangan Williamson (IW), dan Indeks Entropi Theil serta analisa hasilnya.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.